



BAB 3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang, khususnya dalam memproyeksikan target kinerja keuangan periode mendatang. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya, dapat diketahui berapa rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, yang dapat dijadikan ukuran dalam penentuan target keuangan daerah.

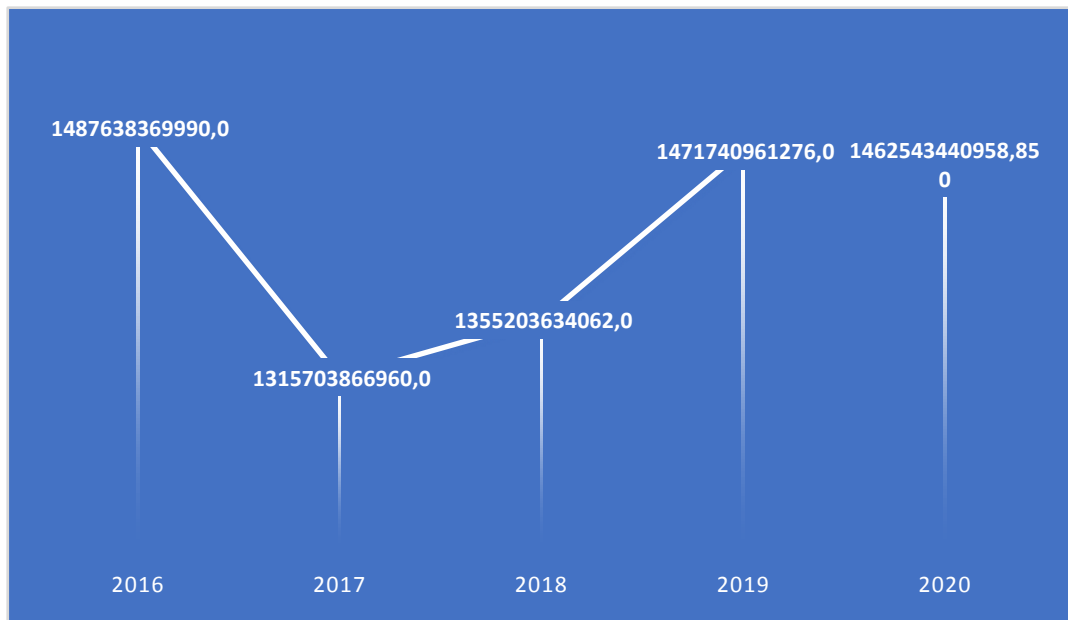


Ruang lingkup analisis kinerja keuangan masa lalu meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD menjelaskan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Sedangkan neraca daerah menjelaskan tentang perkembangan necara daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktifitas.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.487.638.369.990,- dan turun di tahun 2020 sebesar Rp. 1.462.543.440.959,- dengan pertumbuhan minus 0,15 persen.



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)

Gambar 3. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

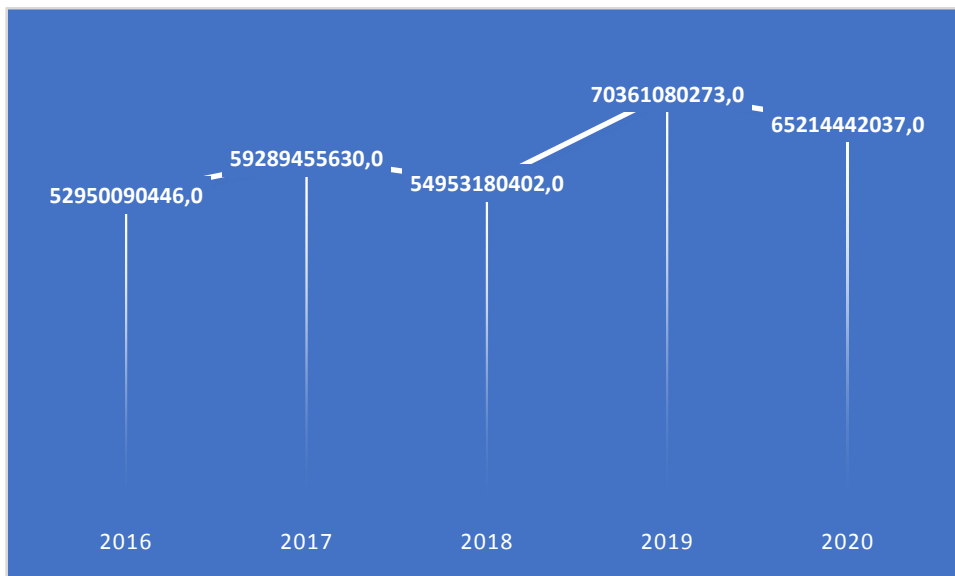
Berdasarkan data realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020 dan jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2016 dan tahun 2020, pendapatan daerah Kabupaten Malinau mengalami penurunan sebesar minus 1 persen dengan rata-rata penurunan pendapatan daerah per tahun sebesar minus



0,24persen. Penurunan pendapatan daerah tersebut terjadi pada sektor Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer.

Penurunan Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari Tahun 2016 sampai dengan tahun2020, menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah mengalami penurunan, khususnya Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut perlu dilaksanakan kordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, melakukan kajian terhadap komponen penentu DAUsebagai bahan masukan Pemerintah Pusat danmeningkatkan indikator-indikator yang digunakan dalam perhitungan dana transfer agar pendapatan daerah diterima dengan optimal.

Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 2Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau 2016-2020 (Milyar Rupiah)

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau tahun 2016 sebesar Rp. 52,950 milyar sedangkan PAD pada tahun 2020 sebesar Rp. 65,214 milyar Selama kurun waktu 2016-2020 PAD Kabupaten Malinau mengalami rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 30,38 persen.

Adapun komponen – komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut :



a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 selalu mencapai target yang ditetapkan dalam APBD meningkat sebesar 619,61 persen rata-rata pertumbuhannya.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Target PAD yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 2016 dan 2020 menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 88,52 persen

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau memperoleh PAD yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada tahun 2016 dan 2020, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurun sebesar minus 4,60 persen.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian kinerja PAD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020. rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 33,45 persen..

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau Bersumber dari :

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- b. Dana Perimbangan,
- c. Transfer Pemerintah Pusat
- d. Lainnya, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, dan
- e. Bantuan Keuangan.

Meskipun Pendapatan Transfer mengalami perkembangan yang fluktuatif pada tahun 2016, akan tetapi pada tahun 2020 Pendapatan Transfer mengalami penurunan. Secara umum, Pendapatan Transfer Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar minus 5,31 persen.



Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :

a) Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan

Pada tahun 2016 dan 2020, Target Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan menurun sebesar rata-rata minus 6,35 persen.

b) Dana Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2016 dan 2020, Target Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan tumbuh negatif sebesar 16,21 persen

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pada tahun 2016 dan 2020, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meningkat tajam sebesar 53,73 persen. Adapun rincian lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari :

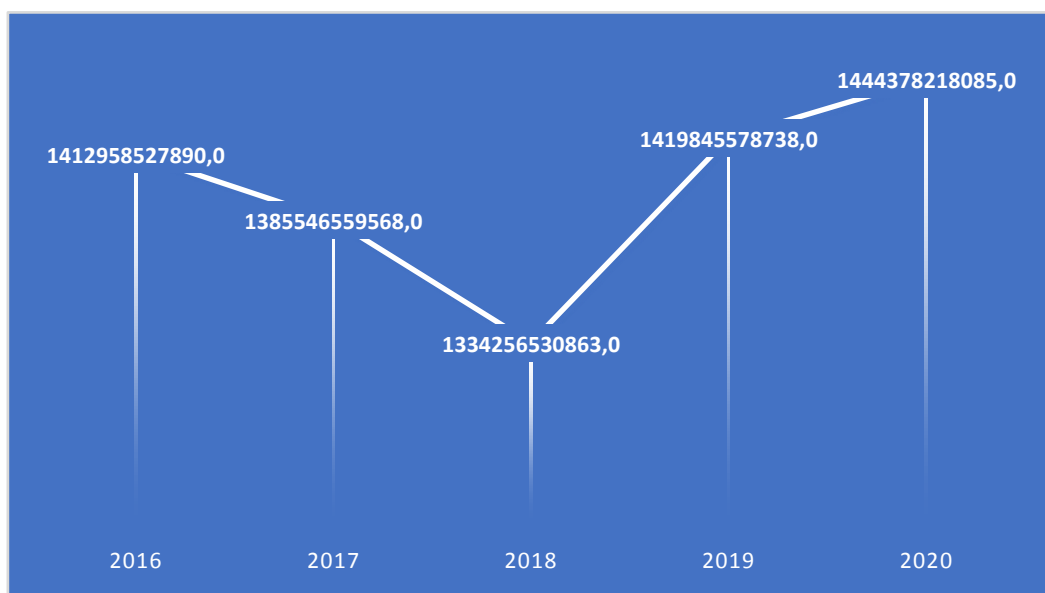
1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2016 dan 2020, Pendapatan Hibah tumbuh negatif sebesar 24,04 persen

2) Pendapatan Lainnya

Pada tahun 2016 dan 2020, Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Lainnya penyumbang pendapatan terbesar naik positif sebesar 50,11 persen.

2. Belanja Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 3 Transfer Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020



Belanja Daerah Kabupaten Malinau selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan yang berfluktuatif dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan meningkat 0,92 persen. Belanja daerah terbesar dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

Belanja Daerah Kabupaten Malinau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi diarahkan untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan, akses, gaji ke tiga belas), tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (uang makan, tunjangan guru terampil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan paramedis), belanja hibah belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja barang dan jasa. Pada tahun 2016 dan 2020, Belanja Operasional meningkat sebesar 0,70 persen.

2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Malinau dialokasikan dalam rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan. Belanja modal diarahkan untuk membiayai belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan / irigasi / jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Alokasi belanja modal terbesar diarahkan untuk membiayai pembangunan gedung dan bangunan serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringannya. Pada tahun 2016 dan 2020, belanja modal Kabupaten Malinau menurun sebesar minus 48,30 persen rata-rata per tahunnya.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.



Pada tahun 2016 dan 2020, alokasi belanja tidak terduga sebesar meningkat sebesar Rp. 38.892.325.734,-

4) Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Malinau terdiri dari Bantuan Keuangan ke Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Bantuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 47 ayat (1) menjelaskan bahwa Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik. Pada tahun 2016 dan 2020, alokasi transfer Kabupaten Malinau meningkat rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 100,12 persen.



Tabel 3. 1
Pertumbuhan Rata-Rata Realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
PENDAPATAN	1.487.638.369.990	1.315.703.866.960	1.355.203.634.062	1.471.740.961.276	1.462.543.440.959	-1,22%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	52.950.090.446	59.289.455.630	54.953.180.402	70.361.080.273	65.214.442.037	30,38%
Pajak Daerah	1.751.870.417	8.956.402.934	8.702.286.031	13.572.119.158	10.103.027.404	619,61%
Retribusi Daerah	14.176.909.929	1.376.106.350	2.340.910.905	1.693.507.434	1.444.868.069	-88,52%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.089.642.445	6.548.674.596	5.889.163.498	5.549.995.354	3.250.680.717	-4,60%
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	37.287.452.420	42.408.271.751	38.020.819.967	49.545.458.328	50.415.865.848	33,45%
PENDAPATAN TRANSFER	1.418.343.179.544	1.240.528.052.539	1.282.161.537.859	1.386.043.958.923	1.221.925.653.921	-5,31%
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.379.112.239.737	1.212.129.134.446	1.252.652.966.371	1.343.423.019.144	1.147.461.770.413	-6,35%
Dana Bagi Hasil Pajak	39.230.939.807	28.398.918.093	29.508.571.488	32.195.858.745	34.979.905.378	-16,21%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA				193.032.307.921	188.473.396.312	
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA				814.152.557.000	784.353.307.000	
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA				97.886.691.067	97.978.950.122	
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA				50.055.229.411	41.676.211.601	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA				148.072.875.000	21.601.351.000	
Dana Penyesuaian - LRA				148.072.875.000	21.601.351.000	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				42.620.939.779	43.149.023.138	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA				42.620.939.779	43.149.023.138	
Bantuan Keuangan - LRA				8.027.500.000	9.713.509.370	
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA				8.027.500.000	9.713.509.370	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	18.345.100.000	15.886.358.791	18.088.917.801	15.335.922.080	175.403.345.000	53,73%
Pendapatan Hibah		3.454.551.391	5.704.717.801	2.528.000.000	2.935.000.000	-24,04%
Pendapatan Lainnya	16.345.100.000	12.431.807.400	12.384.200.000	12.807.922.080	172.468.345.000	50,11%
BELANJA DAN TRANSFER	1.412.958.527.890	1.385.546.559.568	1.334.256.530.863	1.419.845.578.738	1.444.378.218.085	0,92%
BELANJA	1.258.606.307.496	1.125.307.832.568	1.064.237.806.883	1.112.522.203.738	1.130.771.445.085	-11,25%
BELANJA OPERASI	931.205.172.812	796.050.981.426	892.240.769.314	936.938.745.462	940.227.025.204	0,70%
Belanja Pegawai	458.253.792.032	444.985.723.850	459.130.216.654	475.652.043.194	481.304.058.967	4,10%
Belanja Barang Dan Jasa	385.017.516.718	307.870.815.692	369.575.357.048	396.782.006.547	369.937.443.643	1,27%
Belanja Bunga						
Belanja Subsidi	10.276.371.514	6.036.814.177	360.659.600	2.401.130.200	1.881.918.000	-78,02%
Belanja Hibah	74.941.479.492	35.709.840.307	62.873.345.512	56.626.115.521	83.194.061.169	-16,81%
Bantuan Sosial	2.716.013.156	1.447.787.400	301.190.500	5.477.450.000	3.909.543.425	85,37%



Uraian	2016	2017	Tahun 2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan Per Tahun (%)
BELANJA MODAL	327.401.134.684	329.256.851.142	171.991.537.569	175.583.458.276	151.652.094.147	-48,30%
Belanja Tanah	952.578.999	4.256.251.259	1.767.981.289	2.692.520.411	78.305.181	16,73%
Belanja Peralatan Dan Mesin	39.887.755.144	19.914.481.284	35.147.498.459	34.751.331.482	25.507.715.860	-19,36%
Belanja Gedung Dan Bangunan	7.921.446.940	49.173.907.356	21.924.797.602	60.293.802.288	50.360.093.912	627,65%
Belanja Jasa, Irigasi Dan Jaringan	278.063.426.101	254.775.521.088	112.723.572.469	76.664.016.846	74.974.715.067	-72,58%
Belanja Aset Tetap Lainnya	340.751.500	890.040.155	30.000.000	16.500.000	-	-100,00%
Belanja Aset Lainnya	235.176.000	246.650.000	397.687.750	1.165.287.249	731.264.127	341,01%
BELANJA TIDAK TERDUGA			5.500.000		38.892.325.734	
belanja tak terduga			5.500.000		38.892.325.734	
TRANSFER	154.352.220.294	260.338.727.000	270.018.723.980	307.323.375.000	313.606.773.000	100,12%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	154.352.220.294	260.338.727.000	270.018.723.980	307.323.375.000	313.606.773.000	100,12%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	154.099.999.577	260.338.727.000	270.018.723.980	8.027.500.000	-	-100,00%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	252.220.717			299.295.875.000	313.606.773.000	#DIV/0!
SURPLUS/(DEFISIT)	74.679.842.100	-69.842.692.608	20.947.103.199	51.895.382.538	18.165.222.874	-46,55%
PEMBIAYAAN PENERIMAAN	20.406.806.269	92.007.206.040	20.818.430.950	237.983.447.541	236.622.534.646	1064,53%
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa)	20.375.160.269	91.989.793.040	20.816.830.990	37.978.980.541	86.622.534.646	129,07%
Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan						
Penerimaan Pinjaman Daerah Bank Dunia						
Penerimaan Kembali Piutang Daerah		17.415.000	1.600.000	4.467.000		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	31.646.000			200.000.000.000	150.000.000.000	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.406.806.269	92.007.206.040	20.818.430.950	237.983.447.541	236.622.534.646	1064,53%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN			2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000	
Pembentukan Dana Cadangan						
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			2.000.000.000	200.000.000.000	3.000.000.000	
Pembayaran Pokok Utang (Pinjaman Bank Dunia)					150.000.000.000	
Pembiayaan Utang Kepada Pihak Ketiga						
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN			2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000	
PEMBIAYAAN NETTO	20.406.806.269	92.007.208.040	18.818.430.990	37.983.447.541	83.622.534.646	126,73%
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	3.096.855.330					
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	91.989.793.040	22.164.515.432	39.765.536.189	89.878.830.079	101.787.757.519	0,79%

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)



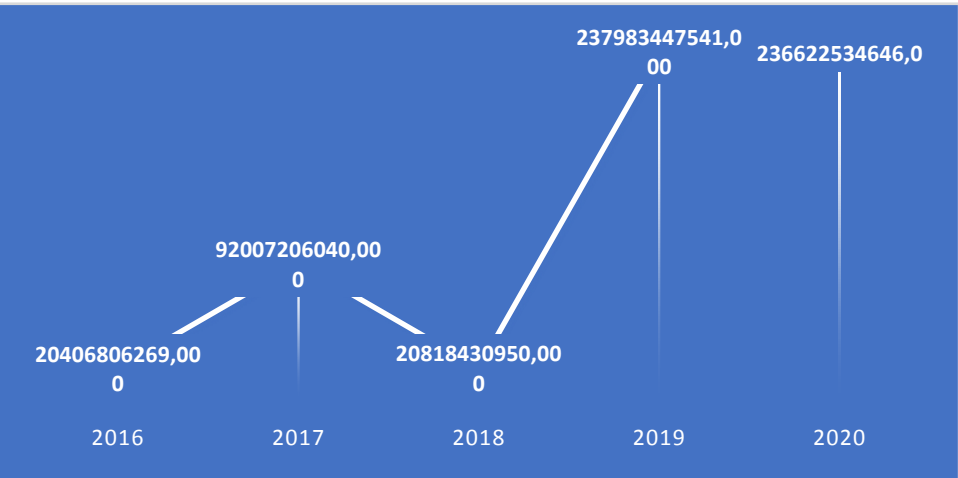
3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2016 dan 2020 dianggarkan meningkat rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 329,01 persen Penerimaan pembiayaan tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan piutang daerah.



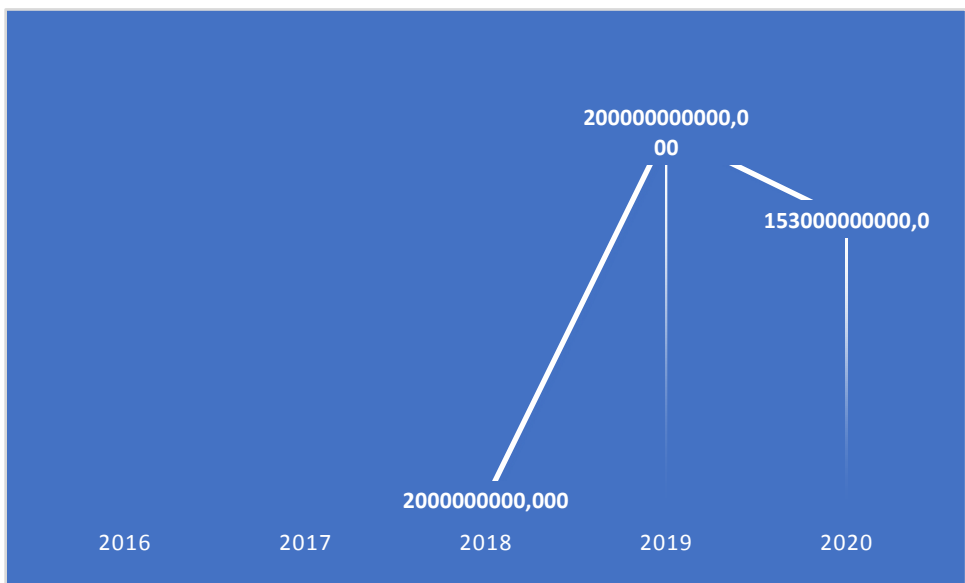
Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 4Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020



2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malinau selama tahun 2016-2020 dialokasi untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran utang kepada pihak ketiga. Pada tahun 2019 dan 2020, meningkat sangat tinggi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Malinau.

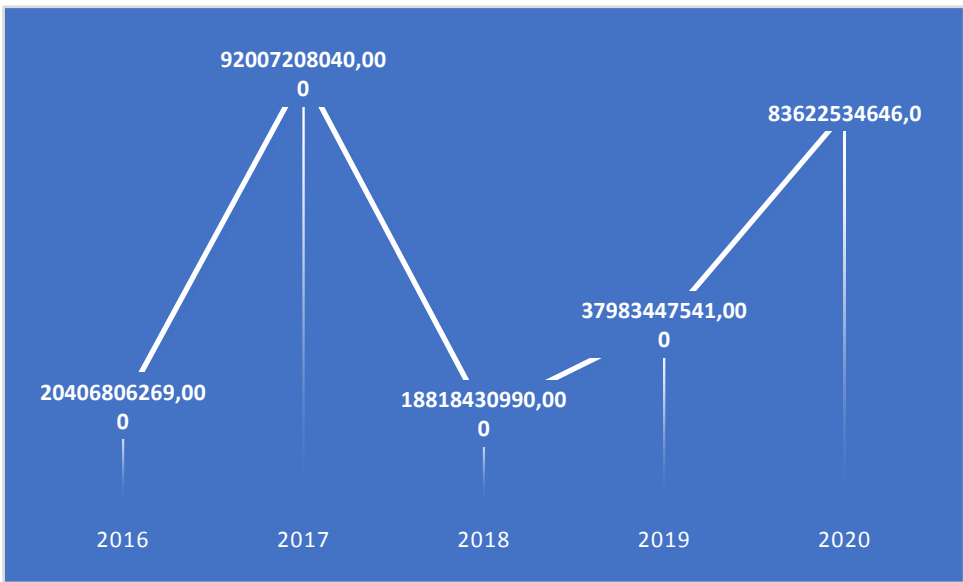


Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 5Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

3) Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto yang dianggarkan harus dapat menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto Kabupaten Malinau pada tahun 2016 dan 2020 meningkat sebesar 123,33 persen rata-rata pertumbuhan per tahunnya.

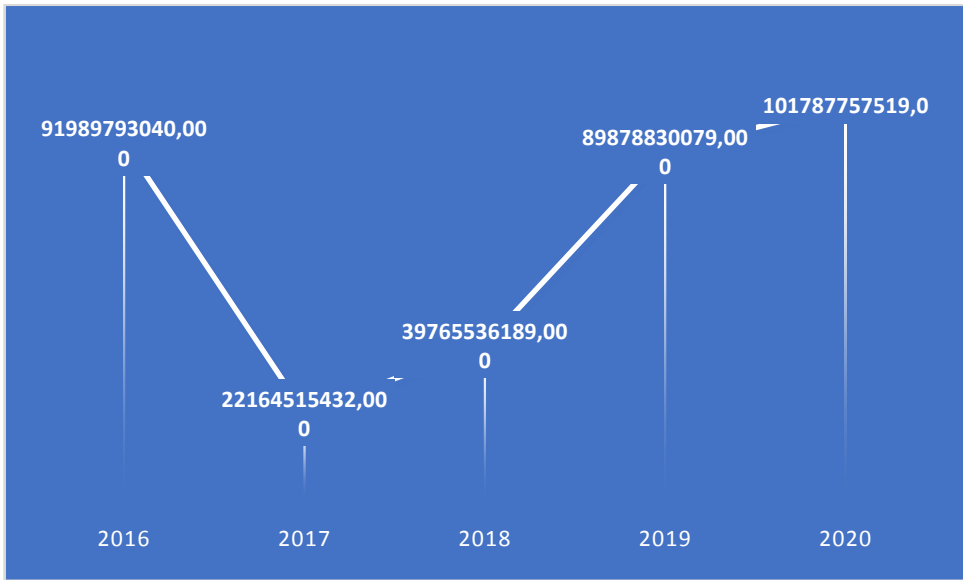


Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 6Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Netto Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, Realisasi SiLPA Kabupaten Malinau mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 dan 2020, SiLPA Kabupaten Malinau terealisasi meningkat sebesar 35,69 persen rata-rata pertumbuhannya.



Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2020)

Gambar 3. 7Target dan Realisasi SILPA Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

3.1.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca

Laporan keuangan merupakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan pengguna lainnya untuk menilai akuntabilitas



keuangan daerah dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca merupakan bagian dari komponen laporan keuangan Pemerintah daerah LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode tertentu. Sedangkan Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan entitas pada tanggal tertentu. Secara ringkas Laporan Realisasi APBD dan Neraca Kabupaten Malinau tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 2
Neraca Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
ASET	5.359.454.379.542,42	4.994.155.623.518,90	4.840.095.778.151,28	4.951.225.759.723,33	4.828.120.654.139,19	-8,20%
ASET LANCAR	149.542.274.522,56	146.087.790.253,95	198.736.943.066,20	325.845.809.167,56	244.327.482.261,26	102,76%
Kas	97.737.283.524,35	25.512.375.014,04	40.876.410.003,17	91.090.307.048,84	101.884.161.897,36	-4,15%
Kas di Kas Daerah	76.778.682.818,73	1.053.600.846,62	19.244.893.255,85	70.760.651.001,84	92.914.312.006,69	-1,34%
Kas di Bendahara Penerimaan	560.665.780,00	117.257.200,00	80.144.300,00	103.839.456,00	97.229.350,00	-81,78%
Kas di Bendahara pengeluaran	200.000.000,00	257.833.500,00	22.593.313,00	10.172.100,00	366.037.939,00	-87,54%
Kas di Bendahara BLUD	12.813.908.980,00	16.829.900.092,00	17.693.670.431,00	14.399.892.064,00	6.367.029.845,00	-8,36%
Kas di Rekening JKN	2.360.025.945,62	1.907.092.990,97	166.645,32	10.632.505,00		-100,00%
Kas di Bendahara Dana BOS	5.024.000.000,00	5.346.690.384,45	3.834.942.058,00			-100,00%
Kas Lainnya				5.805.119.922,00	2.139.552.756,67	-22,08%
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-		
Deposito	-	-	-	-		
Piutang	-	-	-	-		
Piutang Pendapatan Asli Daerah	3.443.892.737,00	4.537.972.793,00	5.827.188.129,00	6.964.924.489,00	0	-100,00%
Piutang Deviden	-	-	-	-		
Piutang Dana Bagi Hasil	26.804.097.587,08	75.713.634.456,32	71.178.188.129,00	121.270.671.832,23	88.612.150.212,80	318,30%
Piutang Pendapatan Dana BOS	-	-	-	-		
Penyisihan Piutang Pendapatan	-844.173.563,71	-1.407.471.947,00	-2.060.983.738,50	-2.634.130.532,75		-100,00%
Piutang lain-lain	9.886.749.990,00	1.014.274.108,14	12.460.126.287,00	16.324.997.271,83	6.584.357.788,00	31,59%
Penyisihan Piutang Lainnya	-441.529.629,00	-757.660.138,00	-808.609.095,84	-1.363.881.687,80	(5.732.239.456,12)	342,29%
Beban Dibayar di Muka	590.112.013,44	280.000.000,00	126.917.621,77	-		-100,00%
Persediaan	12.366.141.783,40	32.094.665.967,45	71.137.304.795,60	94.192.920.746,21	52.979.051.819,22	559,64%
INVESTASI JANGKA PANJANG	110.602.191.858,00	111.294.125.550,79	114.162.392.698,73	114.326.965.375,78	116.992.628.369,66	3,97%



URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
Investasi Non Permanen	1.873.012.174,00	1.469.931.680,79	1.273.517.800,78	1.277.573.895,78	943.236.889,66	-36,77%
Investasi Dana Bergulir	3.068.524.469,26	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	2.712.523.087,00	-11,60%
Dana bergulir diragukan tertagih	-1.195.512.295,26	-1.242.591.406,21	-1.439.005.286,22	-1.434.949.191,22	(1.769.286.197,34)	26,48%
Investasi Permanen	108.729.179.684,00	109.824.194.870,00	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	4,66%
Penyertaan Modal Pemerintah daerah	108.729.179.684,00	109.824.194.870,00	112.888.874.898,00	113.049.391.480,00	116.049.391.480,00	4,66%
ASET TETAP	4.929.212.003.042,72	4.591.138.250.099,98	4.381.657.545.991,18	4.354.930.677.492,66	4.293.793.736.414,44	-11,96%
Tanah	232.781.375.655,48	1.405.187.169.340,44	1.405.060.954.740,66	1.407.532.353.790,66	1.406.125.600.660,67	504,51%
Peralatan dan Mesin	423.116.294.018,52	431.617.701.612,95	465.582.422.128,95	450.933.961.838,04	478.905.670.917,44	8,19%
Bangunan Gedung	1.689.117.576.725,42	1.622.047.450.945,46	1.646.343.602.774,08	1.737.854.602.512,08	1.764.653.239.504,08	3,28%
Jalan, Jembatan dan Jaringan	3.831.108.234.521,84	2.550.312.458.893,74	2.584.495.718.951,74	2.657.672.127.419,11	2.750.590.871.978,60	-30,03%
Aset Tetap Lainnya	22.490.208.738,00	22.879.520.463,00	22.906.520.463,00	21.422.085.223,00	21.225.842.975,00	-4,97%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	401.944.073.863,00	174.766.101.513,00	723.558.879.233,00	40.864.047.203,00	38.344.681.833,00	-89,99%
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	-	-	-	-	-	20,30%
	1.671.345.760.479,54	1.615.672.142.668,61	1.815.090.552.300,25	1.961.348.500.493,23	(2.166.052.171.454,35)	
DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA	170.097.910.119,14	145.635.446.614,18	145.538.896.395,12	126.122.307.587,33	173.006.807.093,83	-19,76%
Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	
TPTGR	86.850.000,00	74.850.000,00	62.850.000,00	50.850.000,00	50.850.000,00	-41,45%
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	
Aset Tidak Berwujud	11.850.145.135,76	7.061.299.033,74	6.132.985.713,88	4.561.537.353,25	4.356.993.908,03	-61,95%
Akumulasi Amortisasi Aset tidak terwujud	-4.573.894.486,94	-	-	-	-	-100,00%
Penyertaan Modal yg belum ditetapkan statusnya	-	-	-	-	-	
Aset Lain-Lain	406.111.707.586,64	138.148.550.075,44	139.174.098.181,24	121.509.920.334,08	168.598.963.185,80	-67,53%
Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	-243.779.799.856,32	-	-	-	-	-100,00%



URAIAN	2016 (Audited) 0	2017 (Audited) 0	2018 (Audited) 0	2019 (Audited) 0	2020 (Unaudited) 0	rata-rata pertumbuhan per tahun (%)
ternak bergulir	402.901.740,00	350.747.500,00	168.962.500,00	-		-100,00%
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.359.454.379.542,42	4.994.135.623.518,90	4.840.095.778.151,28	4.921.225.759.723,33	4.828.120.654.139,19	-8,61%
KEWAJIBAN	266.312.370.844,88	96.051.612.180,89	5.690.251.576,51	19.030.166.602,10	27.565.970.897,68	-92,16%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	266.312.370.844,88	96.051.612.180,89	5.690.251.576,51	19.030.166.602,10	27.565.970.897,68	-92,16%
Utang PFK	1.241.466.593,74	350.428.870,30	415.130,39	-		-100,00%
Utang Bunga	-	-	-	-		
Pendapatan diterima di muka	308.012.954,21	273.148.344,72	17.038.882,80	109.973.530,15	92.793.566,29	-65,78%
Utang Pajak	-	-	-	-	-	
Utang Langganan	-	-	-	-		
utang beban	19.842.929.805,00	5.862.321.286,30	4.005.359.882,30	8.913.994.162,93	5.083.307.647,39	-60,96%
Utang kepada pihak ketiga/rekanan	-	-	-	-		
Utang pengadaan aset tetap/kepada pihak ketiga	-	-	-	-		
Utang Lain-lain	244.919.941.491,93	89.565.613.679,57	1.667.437.681,02	10.006.198.909,02	22.389.869.684,00	-95,00%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	-	-		
Utang Dalam Negeri	-	-	-	-		
Utang Luar Negeri	-	-	-	-		
EKUITAS	5.093.142.008.697,54	4.898.104.011.338,01	4.834.405.526.574,77	4.902.195.593.121,23	4.800.554.683.241,51	-4,25%

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau (2021)



1) Analisis Rasio Neraca Daerah

Analisis rasio keuangan daerah merupakan analisis yang membandingkan besaran atau nilai yang terdapat dalam laporan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengetahui posisi dan kinerja keuangan di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Pada sub bab ini analisis rasio keuangan daerah yang akan dibahas adalah analisis rasio keuangan daerah terkait laporan neraca daerah.

Tabel 3. 3
Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Malinau 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Modal Kerja	-116.770.096.322	50.036.178.073	193.046.691.490	306.815.642.565	216.761.511.364
Rasio Likuiditas					
Rasio Lancar (Current Ratio)	0,56	1,52	34,93	17,12	8,86
Rasio Quick (Quick Ratio)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Rasio Solvabilitas					
Rasio Total Hutang Terhadap Total Asset	0,05	0,019	0,001	0,004	0,006
Rasio Hutang Terhadap Modal	0,052	0,02	0,001	0,004	0,006
Rasio Kas	0,38	0,313	8,208	5,153	3,696

Sumber : Analisis diolah, (2021).

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar



kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran keuangan daerah antara lain untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pembangunan. Belanja aparatur daerah merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Analisis terkait proporsi penggunaan anggaran untuk kebutuhan aparatur menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. Besaran nilai belanja tidak langsung sebagai realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur daerah Kabupaten Malinau menunjukkan besaran yang semakin menurun dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020, dengan penurunan sebesar 68,76 persen di tahun 2020. Hasil perhitungan dapat di lihat pada tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Malinau

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	TA 2016	931.205.172.812	1.279.013.113.765	72,81%
2	TA 2017	796.050.981.426	1.217.315.038.608	65,39%
3	TA 2018	892.240.769.314	1.085.056.237.833	82,23%



No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)(Rp)	Persentase
4	TA 2019	936.938.745.462	1.350.505.651.279	69,38%
5	TA 2020	940.227.025.204	1.367.393.979.731	68,76%

Sumber : Analisis diolah, (2021).

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi dalam APBD sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Defisit riil dalam APBD terjadi apabila pendapatan daerah dikurangi dengan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah menimbulkan adanya defisit dalam APBD. Kondisi defisit riil APBD Kabupaten Malinau Tahun 2016–2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. Defisit riil yang terjadi ditutup dengan penerimaan pembiayaan sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 5
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Malinau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.487.638.369.990	1.315.703.866.960	1.355.203.634.062	1.471.740.961.276	1.462.543.440.959
	Dikurangi Realisasi :					
2	Belanja Daerah	1.258.606.307.496	1.125.307.832.568	1.064.237.806.883	1.112.522.203.738	1.130.771.445.085
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	000	000	2.000.000.000	200.000.000.000	153.000.000.000
	Defisit Riil	229.032.062.494	190.396.034.392	288.965.827.179	159.218.757.538	178.771.995.874

Sumber : Analisis diolah, (2021).

3.3 KERANGKA PENDANAAN

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2026

Perhitungan kemampuan anggaran pemerintah Kabupaten Malinau berkaitan erat dengan kapasitas daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai daerah, pembangunan di Kabupaten Malinau masih dilakukan secara masif di berbagai bidang, dimana pelaksanaan pembangunan tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penganggaran daerah. Maka dari itu anggaran di



analisis untuk melihat seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Tabel 3. 6
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
4	Pendapatan	1,56	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
4.1	Pendapatan Asli Daerah	2,81	65.233.155.830	67.621.601.190	70.097.637.854	71.605.858.017	72.873.209.435
4.1.01	Pajak Daerah	3,22	10.846.710.000	11.250.207.612	11.668.715.335	12.102.791.546	12.310.959.560
4.1.02	Retribusi Daerah	3,59	1.753.946.500	1.816.913.179	1.882.140.362	1.949.709.202	2.019.703.762
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan	4,02	3.325.430.716	3.467.426.608	3.615.485.724	3.769.866.964	3.893.141.614
4.1.04	Lain - Lain Pedapatan Yang Sah	2,61	49.307.068.614	51.087.053.791	52.931.296.433	53.783.490.305	54.649.404.499
4.2	Pendapatan Transfer	1,51	1.274.739.670.786	1.321.948.229.511	1.336.988.313.503	1.345.949.350.048	1.353.435.084.560
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,21	1.216.456.171.800	1.250.607.938.341	1.263.147.302.148	1.270.587.004.925	1.276.517.582.105
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1,08	1.045.310.522.800	1.072.171.484.693	1.082.462.549.185	1.087.625.624.075	1.091.250.887.855
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (Dbh)	2,05	152.466.811.000	155.973.547.653	159.560.939.249	163.230.840.852	165.352.841.783
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	0,78	780.635.100.000	799.994.850.480	803.834.825.762	804.477.893.623	805.121.475.938
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (Dak) Fisik	0,72	63.553.479.800	64.964.367.051	65.107.288.659	65.250.524.694	65.394.075.848
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (Dak) Non Fisik	3,29	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (Did)	0	-	-	-	-	-
4.2.01.05	Dana Desa	2	171.145.649.000	178.436.453.647	180.684.752.963	182.961.380.851	185.266.694.249
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	7,18	58.283.498.986	71.340.291.170	73.841.011.354	75.362.345.123	76.917.502.455
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	5,56	45.712.198.986	51.842.204.870	54.128.446.105	55.432.941.656	56.768.875.550



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	12,52	12.571.300.000	19.498.086.300	19.712.565.249	19.929.403.467	20.148.626.905
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	-	-	-	-	-
4.3.02	Dana Darurat	0	-	-	-	-	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
4.3.03.01	Lain-Lain Pendapatan	0	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000	13.455.400.000
5	Belanja Daerah	1,56	1.350.428.226.616	1.401.525.230.701	1.419.041.351.357	1.429.510.608.065	1.438.263.693.995
5.1	Belanja Operasi	1,54	715.148.266.323	745.148.266.323	753.148.266.323	756.340.895.143	760.288.667.675
5.1.1	Belanja Pegawai	1,24	572.183.674.386	591.683.674.386	598.683.674.386	601.876.303.206	602.824.075.738
5.1.2	Belanja Barang Dan Jasa	3,06	109.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	120.353.366.477	123.353.366.477
5.1.4	Belanja Subsidi	8,78	5.000.000.000	6.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	0	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590
5.2	Belanja Modal	1,97	309.500.575.293	320.806.774.731	327.574.596.071	332.574.596.071	334.574.596.071
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18,92	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	2	70.054.121.924	75.054.121.924	75.821.943.264	75.821.943.264	75.821.943.264
5.2.3	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1,75	125.138.354.553	125.138.354.553	130.138.354.553	134.138.354.553	134.138.354.553
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	1,15	106.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	109.739.268.016	111.739.268.016



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Uraian		Pertumbuhan (%)	2022	2023	2024	2025	2026
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10,76	4.568.830.800	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238	6.875.030.238
5.3	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	18,92	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
5.3.1	Belanja Bantuan Keuangan	1,06	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
6	Pembiayaan Daerah	0	(3.000.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)	(1.500.000.000)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0	0	0	0	0	0
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman					
	Total Penerimaan Anggaran	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
	Dikurangi					
6	Belanja Tak Langsung	593.724.244.078	603.739.940.610	606.990.889.582	606.891.687.665	589.867.299.921
7	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	0
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	759.703.982.538	799.285.290.091	813.550.461.775	824.118.920.400	849.896.394.074

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.



RPJMD KABUPATEN MALINAU 2021-2026

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Pendapatan	1.353.428.226.616	1.403.025.230.701	1.420.541.351.357	1.431.010.608.065	1.439.763.693.995
	PRIORITAS 1					
1	Belanja Pegawai	575.183.674.386	593.183.674.386	600.183.674.386	603.376.303.206	604.324.075.738
2	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	4.000.000.000
3	Penyertaan modal	3.000.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
	PRIORITAS 2					
1	Belanja Bersumber dana DAK	48.655.132.000	51.238.719.509	53.959.495.515	54.666.364.906	55.382.494.287
2	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Urusan Pemerintah Daerah	326.335.392.084	339.296.550.201	339.296.550.201	350.922.261.881	354.243.167.872
	PRIORITAS 3					
1	Belanja Hibah	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870	20.987.758.870
2	Belanja Bantuan Sosial	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590	4.623.466.590
3	Belanja Bantuan Keuangan	326.779.385.000	334.070.189.647	336.318.488.963	338.595.116.851	340.900.430.249
	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	45.863.417.686	55.124.871.498	60.171.916.832	52.839.335.761	53.802.300.389

Sumber : BPKD Kabupaten Malinau, 2021.